

masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam lembaga perekonomian di Desa khususnya Badan Usaha Milik Desa Estu Mukti. Hal ini perlu dilakukan agar setiap masyarakat akan mendapatkan pencerahan dan hasilnya semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap perkembangan Badan Usaha Milik Desa Estu Mukti dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Departemen Pendidikan Nasional pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Fauza, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Joenairto, 1992. *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: Rajawali.
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang: Badan Penerbit Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Marbun, B.N. 1994. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta: Airlangga.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan&Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pantja, Gsw Astawa. 2013. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- S.T, Christine Kansil. 2004. *Pemerintahan Daeah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S, Naution. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito: Bandung.
- Sembring, Sentosa. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, R. 2011. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sufianto, Dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suriyaningrat, Bayu. 1980. *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*. Jakarta: Aksara Baru.

- Sri, Ani Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irawan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Wasistiono, Sadu. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal – Jurnal dan Artikel

- Coristya, Heru, dan Suwondo, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Ferdianto, Benny. 2016 .“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”.Skripsi.Bandar Lampung :Universitas Lampung.
- Purnamasari, Nurul. “Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi)”. Slide Interface Penabulu Alliance.

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Melalui Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan
Usaha Milik Desa Bersama
Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Estu Mukti

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Nowo Sugiartoselaku Kepala Desa Bejalen pada
hari Senin, 14 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibu Rini Suratih selaku Direktur Utama Badan Usaha
Milik Desa Estu Mukti pada hari Senin, 14 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibu Lala Icha selaku Kepala Unit Usaha Kampung
Pelangi pada hari Senin, 14 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Achmad Wiranto selaku Kepala Unit Usaha
Agrowisata Kampung Rawa pada hari Senin, 14 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Rusyadi selaku Kepala Unit Usaha Bisnis
Keuangan pada hari Senin, 14 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Heri Wijanarko selaku Kepala Unit Usaha
Penyewaan Barang, Produksi, dan Perdagangan pada hari Senin, 14
januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Anjar Gumelar selaku Warga Desa Bejalen pada
hari Senin, 14 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Apri Kusworo selaku Pengawas Badan Usaha

Milik Desa Estu Mukti pada hari Senin, 14 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibu Yuliana Wariningsih selaku Pengawas Badan Usaha

Milik Desa Estu Mukti pada hari Senin, 14 Januari 2019.